

**PENGARUH KUALITAS AUDITOR EKSTERNAL
DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

(Studi Empiris terhadap Perusahaan yang Tercatat di Indeks Kompas 100

Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

DYAH PUTRI MAHARANI

NIM. 12030111130082

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dyah Putri Maharani
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130082
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KUALITAS AUDITOR
EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***
(Studi empiris pada perusahaan yang tercatat di
Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia tahun
2010-2013)

Dosen Pembimbing : Puji Harto, SE., M.Si., Akt., Ph.D

Semarang, 12 Maret 2015

Dosen Pembimbing,

(Puji Harto, SE., M.Si., Akt., Ph.D)

NIP. 197505272000121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Dyah Putri Maharani

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130082

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KUALITAS AUDITOR
EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*** (Studi empiris
pada perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas
100 Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Maret 2015

Tim Penguji

1. Puji Harto, SE., M.Si., Akt., Ph.D (.....)
2. Fuad, S.E.T, M.Si., Ph.D. (.....)
3. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dyah Putri Maharani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* (Studi empiris pada perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis lainnya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 12 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

Dyah Putri Maharani

NIM: 12030111130082

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the influence of external auditor quality and audit committee to tax avoidance. The dependent variable is tax avoidance which is proxied by GAAP ETR. Independent variable are external auditor quality which is proxied by size of public accountant firm and audit fee. While, audit committee is proxied by the number of audit committee meetings and financial expertise background of audit committee.

This study was used secondary data from annual reports of companies which were listed on Kompas 100 index of Indonesia Stock Exchange in 2010-2013. Samples were 119 companies. This study used purposive sampling method and multiple linear regression as the analysis method. Before being conducted by regression test, it was examined by using the classical assumption tests.

The results of this study indicate that the size of public accountant firm, audit fee, and financial expertise background of audit committee have positive significant influence to tax avoidance. The number of audit committee meetings did not have significant influence to tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, GAAP ETR, external auditor, audit quality, audit fee, audit committee

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas auditor eksternal dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diproksikan oleh *GAAP ETR* dan variabel independennya adalah kualitas auditor eksternal yang diproksikan oleh ukuran KAP dan *audit fee*. Sedangkan komite audit diproksikan oleh jumlah rapat komite audit dan *financial expertise background* anggota komite audit.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia tahun 2010–2013. Sampel berjumlah 119 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan alat analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran KAP, *audit fee*, dan *financial expertise background* komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci : penghindaran pajak, *GAAP ETR*, auditor eksternal, kualitas audit, *audit fee*, komite audit.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

STAY STRONG,
UNTIL BEING STRONG IS THE LAST CHOICE YOU HAVE.

“I can do all things through Christ who strengthens me.” Philipians 4 : 13

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.” 1 Korintus 10 :13

Skripsi ini aku persembahkan untuk

My Awesome God, Jesus Christ

and

*My super family who gave me love, care, prayers,
and financial support,
Papah, Mamah, Kakakku Ayu dan Adikku Indah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kekuatan dan hikmat kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance (Studi empiris pada perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013)”** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, Msi., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. selaku dosen pembimbing atas motivasi, perhatian, bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
4. Dr. Endang Kiswara S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir studi.
5. Para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis selama proses studi.
7. Keluargaku tercinta, yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, *financial support, my liters of tears*. Papa, Mama sang *Wonder Womanku*,

Kakakku Ayu dan Adikku Indah yang aku sayang.

8. Wanita-wanita XLC, *strong women*. Cani Saputra, Roschandra Putri, Caecilia Mesyan, Bernadette Teni, Tiara Intani.
9. Sahabat terbaikku sejak selama kuliah di Undip hingga berjuang bersama-sama untuk memperoleh S.E, tempat aku bercerita dan menuangkan semua kegilaanku, Prawira Putri Situmorang, Tri Puji Kristia, Elianna, Amelia Agata, Nola Karnia.
10. Terimakasih ku ucapkan untuk teman-temanku Yoga Edo Saputro, Yoel Lasmito, Ardhya Yuda, Rendy Handhika, Hanif Eka Setiaji.
11. Teman-teman akuntansi 2011 untuk setiap kebersamaan yang pernah ada.
12. Keluarga PMK FEB UNDIP seluruh angkatan yang tidak bisa disebutkan satu per satu, sungguh terberkati bisa mengenal kalian semua, khususnya kakak komcilku kak Ayu Fitaria yang selalu memberi semangat.
13. Teman seperjuangan bimbingan skripsi yang selalu memiliki motto : “Jangan pupus harapan”, Siwi, Pepi, Ciwul, Mbak Cici, dan yang lainnya.
14. Teman kos kesayangan Ayu, Riana, Nobita, dan adik-adik kosan semuanya tidak bisa disebutkan satu-satu.
15. KKN Tim 2 Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Temanggung.
16. Keluarga Sobat Bumi Pertamina *Foundation*, untuk pengalamannya.
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini. Jika ada kata lebih dari terimakasih itu yang akan penulis ucapkan untuk kalian semua.

Semarang, 9 Maret 2015

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Teori Agensi.....	10
2.1.2. <i>Tax avoidance</i>	13
2.1.2.1 Tarif pajak efektif.....	16
2.1.3. Auditor eksternal.....	17
2.1.2.1. Ukuran KAP.....	21
2.1.2.2. <i>Audit fee</i>	22
2.1.3. Komite audit.....	24
2.1.3.1. Frekuensi rapat komite audit.....	27
2.1.3.2. <i>Financial expertise background</i>	28
2.2. Penelitianan Terdahulu.....	29
2.3. Kerangka Pemikiran	32

4.2.2. Uji Asumsi Klasik.....	57
4.2.2.1. Uji Normalitas.....	57
4.2.2.2. Uji Heteroskedastisitas.....	59
4.2.2.3. Uji Multikolinearitas	61
4.2.2.4. Uji Autokorelasi	62
4.2.3. Analisis Regresi	63
4.2.4. Uji Hipotesis	65
4.2.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	65
4.2.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)....	66
4.2.4.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statisti t)	67
4.3. Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP.....	80
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	81
5.3. Saran.....	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 Ringkasan Pemilihan Sampel	53
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	54
Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	58
Tabel 4.4 Hasil Uji Glejser	61
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	62
Tabel 4.6 Hasil Runs Test	63
Tabel 4.7 Hasil Uji Durbin-Watson	64
Tabel 4.8 Hasil Regresi Berganda.....	64
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi.....	65
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F.....	66
Tabel 4. 11 Hasil Uji Hipotesis	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot.....	58
Gambar 4.2 Grafik Plot.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya menyejahterakan negara dalam berbagai aspek, pemerintah Indonesia pastinya membutuhkan dana yang sangat besar. Saat ini, berbagai macam potensi tengah digali untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun prediksi para praktisi ekonomi menyatakan bahwa jika Indonesia mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara, itu hanya akan menjadi hambatan besar dan bumerang dikemudian hari. Hal itu dibuktikan dengan utang luar negeri yang terus meningkat dari 2014 hingga awal 2015 yaitu sebesar US\$ 294,5 miliar. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah Indonesia harus berupaya mendongkrak sektor penerimaan dalam negeri.

Terkait dengan penerimaan negara, sektor penerimaan terbesar yang untuk membiayai perekonomian negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Pajak itu sendiri secara umum diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah. Fungsi pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah tersebut biasa dikenal sebagai fungsi *budgeter* pajak.

Seperti yang tercantum dalam APBN tahun 2014, dari Rp. 1.667 triliun pendapatan negara, sebesar Rp1.101 triliun berasal dari penerimaan pajak. Atas dasar itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengkaji strategi penerimaan pajak untuk tahun 2015. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, target penerimaan pajak dalam APBN 2015 cukup tinggi yakni sebesar Rp1.221,72 triliun. Tanpa strategi jitu, target ini bisa tidak terealisasi. Mengingat betapa besarnya penerimaan dari sektor perpajakan, maka pemerintah Indonesia harus meningkatkan langkah optimalisasi penerimaan pajak demi memaksimalkan penerimaan atas sektor pajak.

Dalam praktik pelaksanaan pajak itu sendiri, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar dalam sektor penerimaan pajak adalah perusahaan atau pemilik usaha. Namun, tujuan dari pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Sesuai dengan asumsi bahwa pajak dianggap sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak tersebut sama halnya seperti keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain (Mangoting, 1999). Anggapan inilah yang membuat wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Ketidaksenangan membayar pajak ini juga dipengaruhi oleh sifat pajak yang tidak memberikan kontra prestasi secara langsung bagi pembayar pajak. Perusahaan berusaha mengefisiensikan beban pajaknya sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan, karena semakin besar beban pajak yang dibayar maka laba perusahaan akan semakin berkurang. Salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk mencapai laba yang diharapkan

adalah melakukan upaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan kata lain timbul konsekuensi tindakan manajerial dalam perusahaan, khususnya tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Strategi perusahaan untuk mengurangi atau menghindari pajak memang dapat menguntungkan pemegang saham tetapi hal itu mengorbankan masyarakat mengingat bahwa pajak digunakan sebagian untuk infrastruktur pemerintah dan program-program sosial (Sikka, 2010). Penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak perusahaan adalah masalah yang menjadi perhatian otoritas pajak, pemegang saham, dan masyarakat umum.

Tindakan manajerial yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak inilah yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Fenomena *tax avoidance* ini menjadi salah satu kendala bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Seperti contohnya, di tahun 2005 realisasi investasi yang berasal dari perusahaan multinasional asing diperkirakan mencapai USD 8,68 miliar, dimana jumlah itu terus meningkat setiap tahunnya. Tetapi, pendapatan pajak dari perusahaan multinasional asing yang harusnya tinggi malah dikejutkan dengan fakta bahwa terdapat 750 perusahaan multinasional asing yang berinvestasi di Indonesia tidak membayar pajak karena laporan keuangan perusahaan tersebut terlihat rugi padahal kondisinya sehat. Perusahaan tersebut diperkirakan melakukan upaya penghindaran pembayaran pajak penghasilan dalam kurun waktu yang sama dan berpotensi merugikan negara.

Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak mungkin juga melibatkan akuntansi perpajakan yang kreatif dan / atau manajemen laba. Di sini, manajer menentukan kebijaksanaan atas angka yang dilaporkan tanpa melanggar hukum atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan (Kanagaretnam, et al. 2014). Oleh karena itu, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Hal ini sangat berbeda dengan *tax evasion* dimana *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak tetapi bersifat illegal karena melanggar peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Salah satu bentuk pengawasan bagi tindakan manajerial dalam bidang pajak adalah membentuk tata kelola perusahaan yang baik, termasuk didalamnya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Pada prinsipnya, tugas pokok dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan meninjau sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Sedangkan di sisi lain, laporan keuangan merupakan produk dari manajemen yang kemudian diverifikasi oleh auditor eksternal. Dalam pola hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa

komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan auditor eksternal dimana auditor eksternal adalah pihak independen. Komite audit juga dipandang sebagai mekanisme pengawasan yang berfungsi untuk memperkecil asimetri informasi antara manajer dan anggota dewan diluar (Alves, 2013)

Salah satu tanggung jawab manajemen adalah pemberian informasi kepada *stakeholders* mengenai keseluruhan aktivitas perusahaan termasuk didalamnya pelaporan keuangan. Perusahaan dituntut untuk memberikan laporan keuangan yang kredibel padahal berbagai macam fleksibilitas dalam standar akuntansi dapat memberi kemungkinan kepada manajer untuk mengambil keuntungan tersendiri dan memberikan informasi yang salah. Tindakan manajemen laba yang dikemas dalam bentuk manajemen pajak adalah salah satu contoh tindakan manipulasi angka akuntansi didalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang termasuk dalam bentuk manajemen pajak tersebut sangat berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang pastinya telah diverifikasi oleh auditor eksternal sebelum dipublikasikan. Dalam hal ini, auditor eksternal sebagai pihak yang memberi verifikasi atas kredibilitas laporan keuangan tersebut menghadapi resiko litigasi dan resiko pertaruhan atas reputasi mereka. Risiko litigasi diartikan sebagai risiko mendapat adanya tuntutan litigasi dari pihak eksternal yang merasa dirugikan. Sebagai contoh, KAP *Big 4* yang sudah memiliki nama baik, dengan segala kemampuannya bisa memfasilitasi manajer untuk membantu manajemen dalam melakukan *tax avoidance* atau kemungkinan lain.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini berusaha menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh kinerja auditor eksternal dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Auditor eksternal menggunakan proksi ukuran KAP dan *audit fee*, sedangkan komite audit menggunakan proksi frekuensi rapat dan *financial expertise background* anggota komite audit. Sedangkan dalam mengukur *tax avoidance* dapat menggunakan beberapa cara, namun dalam penelitian ini, menggunakan *GAAP ETR* dengan rumus *tax expense* dibagi dengan *pretax income* seperti yang digunakan dalam Dyreng *et al.* (2008).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah mengganti variabel dependen dari manajemen laba menjadi *tax avoidance*, dan menggunakan *audit fee* sebagai salah satu proksi dalam mengukur kualitas auditor eksternal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai sektor perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100 tahun sehingga tidak hanya fokus satu industri. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat membuktikan pengaruh kualitas auditor eksternal dan komite audit terhadap *tax avoidance* secara universal di berbagai jenis sektor perusahaan. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh kualitas auditor eksternal dan komite audit terhadap *tax avoidance* (Studi Empiris terhadap Perusahaan yang Tercatat di Indeks Kompas 100 Tahun 2010-2013).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan?
2. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan?
3. Apakah jumlah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan?
4. Apakah *financial expertise background* komite audit berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, perlu ditetapkan tujuan penelitian agar tidak kehilangan arah dan hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran KAP terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *audit fee* terhadap *tax avoidance*..
3. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *financial expertise background* anggota komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat digunakan :

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* pada perusahaan.

2. Bagi Manajemen perusahaan

Memberikan masukan mengenai pentingnya pengaruh auditor eksternal dan komite audit dalam meminimalisir terjerumusnya perusahaan dalam perencanaan pajak baik yang bersifat legal dan illegal. Hal ini semata-mata untuk menjauhkan perusahaan dari sanksi hukum atas penyimpangan pajak yang bisa dilakukan.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan contoh indikator dalam memberikan penilaian atas perusahaan dan memberikan keyakinan dalam memilih perusahaan untuk rencana berinvestasi maupun sebagai konsumen.

4. Bagi pembaca dan kajian penelitian selanjutnya

Sebagai referensi kepustakaan dan tambahan literatur bagi para akademisi. Penelitian ini diharapkan menambah literatur mengenai pengaruh kualitas auditor eksternal dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan disempurnakan dalam penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori dan hasil penelitian - penelitian empiris yang relevan untuk dijadikan dasar penelitian. Kemudian digambarkan kerangka pemikiran penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan variabel dalam penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data serta metode yang dipakai untuk pengumpulan data, dan metode analisis penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisisnya dalam rangka pengujian hipotesis serta pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan keterbatasan serta saran untuk penelitian mendatang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Landasan teori menjabarkan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis yang ada dalam penelitian. Landasan teori ini berisi argumentasi dan penjabaran teori yang disusun penulis sebagai tuntunan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian.

2.1.1 Teori Agensi

Penelitian mengenai komite audit maupun kinerja audit eksternal ini didasari oleh *agency theory* (teori agensi). Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara *principal* dan *agen*. Dalam teori agensi, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agen*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agen* tersebut. Permasalahan agensi dimungkinkan dapat timbul akibat adanya pemisahan antara *principal* sbagai pemilik dan *agen* sebagai manajer yang menjalankan perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena masing-masing pihak akan selalu berusaha memaksimalkan fungsi utilitasnya.

Dalam perspektif teori ini dapat dimungkinkan terjadinya ketidaksesuaian dalam bentuk tindakan atau paham yang dianut oleh *agen* dengan *principal* atau dalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena pihak pemilik termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang

selalu meningkat. Sedangkan manajemen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi.

Penelitian ini akan membahas mengenai hubungan manajemen yang bertindak sebagai *agen* dalam menjalankan tugasnya yaitu mengambil keputusan strategis melalui jasa audit dibawah mekanisme pengawasan dari komite audit. Sebuah perusahaan akan membutuhkan kinerja manajerial untuk mengawasi jalannya kegiatan di perusahaan. Disini manajemen akan bertindak sebagai *agen* dan pemegang saham sebagai *principal*. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, *principal* akan memberi tugas kepada komite audit dalam melakukan pengawasan atas kinerja manajerial khususnya dalam pelaporan keuangan. *Principal* juga menggunakan jasa auditor untuk mengontrol kinerja manajerial perusahaan. Disini, laporan keuangan sebagai produk dari manajemen akan memperlihatkan kualitas kinerja yang dihasilkannya.

Komite audit dalam teori ini berperan sebagai pihak ketiga dalam hubungan antara manajemen (*agen*) yang diberi wewenang oleh pemegang saham (*principal*). Auditor eksternal juga berperan sebagai pihak ketiga dalam hubungan antara manajemen (*agen*) yang diberi wewenang oleh pemegang saham (*principal*) dimana kinerjanya tidak terlepas dari pengawasan komite audit. Dalam pekerjaannya, auditor eksternal melakukan fungsi *monitoring* pekerjaan manajerial melalui verifikasi dan pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Sementara itu, komite audit melakukan *monitoring* atas jalannya proses pelaporan keuangan dan kinerja auditor eksternal maupun internal

dimana komite audit dapat memberikan pendapat profesional yang independen kepada *principal*.

Manajer sebagai *agen* diberikan wewenang oleh *principal* untuk mengambil keputusan manjerial. Dalam prosesnya, kemungkinan munculnya perbedaan kepentingan yang memicu timbulnya masalah keagenan dapat terjadi. Wijaya (2012) menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agen* inilah yang disebut dengan *agency problems* yang dapat juga disebabkan karna adanya asimetri informasi. Asimetri informasi itu sendiri adalah ketidaksinambungan informasi yang dimiliki *principal* dan *agen*, ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agen* sebaliknya, *agen* memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Menurut Scott (2003) dalam Sutedja (2013) terdapat dua bentuk informasi asimetris, yakni:

(1) *Adverse Selection*

Merupakan bentuk informasi asimetris, dimana salah satu pihak mempunyai keunggulan informasi dibandingkan pihak lain, tetapi tidak bersedia mengungkapkannya. *Adverse selection* lebih terkait pada tidak adanya pengungkapan yang harus dipublikasikan oleh pihak manajemen perusahaan.

(2) *Moral Hazard*

Moral hazard, sejak awai sudah terdapatindikasi untuk tidak memberikan informasi tersebut pada pihak lain. *Moral hazard* terletak pada masalah motivasi dan usaha manajemen untuk bertindak yang mengutamakan kepentingannya sendiri.

Dari gambaran diatas, manajemen berupaya mencapai tujuan tertentu dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan di mata *principal* yang bisa dicapai melalui hal-hal yang mempengaruhi kepentingan orang banyak, dan salah satunya adalah melalui *tax avoidance*.

2.1.2 Tax avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan fenomena yang cukup unik karena merupakan perbuatan yang sebenarnya legal secara hukum. Hanlon dan Heitzman (2010) menjelaskan bahwa *tax avoidance* didefinisikan secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan. Pengertian lain disebutkan bahwa penghindaran pajak adalah penggunaan aturan sah untuk memodifikasi situasi keuangan individu dalam rangka untuk menurunkan jumlah pajak penghasilan terutang.

Terdapat perbedaan pandangan antar negara satu dengan yang lain mengenai skema apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penghindaran pajak yang diperkenankan atau tidak. Menurut Darussalam (dikutip dari www.ortax.org) skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*).
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).

Di Indonesia sendiri, belum ada definisi yang jelas mengenai *acceptable tax avoidance* maupun *unacceptable tax avoidance*. *Tax avoidance* sangat

mungkin terjadi karena aturan atau undang-undang mengenai pajak dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran yang disebabkan oleh kompleksitas hukum pajak. Dari kompleksnya aturan pajak, terdapat kemungkinan timbulnya penafsiran kreatif yang menguntungkan atas aturan pajak tersebut yang kemudian memicu lahirnya *tax avoidance*. Dalam praktiknya seringkali terdapat perbedaan antara wajib pajak dan aparat pajak mengenai penafsiran dalam peraturan perundangan pajak. Hal itu disebabkan karena dari sudut pandang wajib pajak akan melihat bahwa selama upaya menghindari pajak yang mereka lakukan tidak melanggar undang-undang maka hal tersebut bersifat legal. Sedangkan aparat pajak dan pemerintah tentunya tidak ingin peraturan perundangan tentang pajak malah disalahgunakan semata-mata untuk kepentingan wajib pajak sehingga merugikan negara. Meskipun dari perspektif hukum, moral dan ekonomi beranggapan bahwa penghindaran pajak adalah legal, terlalu banyaknya upaya penghindaran dapat menghasilkan praktik di sisi lain yang kemudian dapat berubah kearah penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melanggar hukum.

Perlu diketahui bahwa *tax avoidance* sangatlah berbeda dengan *tax evasion*. *Tax avoidance* dijelaskan sebagai suatu rangkaian kesatuan strategis perencanaan pajak oleh perusahaan. Sedangkan penelitian Kay (1980) dalam Slemrod dan Yitzhaki (2002) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai upaya untuk merekayasa atau memalsukan sifat dasar dari sebuah obyek (transaksi) sehingga terhindar dari peraturan perundangan yang seharusnya berpengaruh terhadap transaksi itu. Hal tersebut dapat terjadi karena telah dilakukan upaya yang diatur sedemikian rupa sehingga hasilnya adalah perlakuan pajak yang

berbeda dari yang seharusnya. Dengan kata lain, penggelapan pajak merupakan skema memperkecil pajak yang bersifat melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*).

Dalam literatur keagenan, penghindaran pajak dapat memfasilitasi manajerial untuk melakukan manipulasi laba dimana aktivitas ini memunculkan kesempatan bagi manajemen untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor. Hal tersebut memiliki kemungkinan untuk terdeteksi oleh pemeriksa pajak, sehingga manajer membenarkan aktivitas tersebut dengan mengatakan ketidaktahuan atas hal tersebut. (Chasbiandani dan Martani, 2011).

Beberapa pandangan menyatakan bahwa manajer perusahaan, dalam upaya mereka untuk mengurangi pajak perusahaan, adalah suatu tindakan keuangan yang dibenarkan demi kepentingan pemegang saham. Avi-Yonah (2006) dalam Otusanya (2011) berpendapat bahwa :

“Jika pajak dianggap sebagai 'biaya' seperti biaya lain yang dikenakan pada perusahaan, perlu bagi manajemen untuk mencoba untuk meminimalkan biaya ini, atau bahkan mengubahnya menjadi keuntungan”.

Dengan demikian, aktivitas yang berhubungan dengan menegecilkan beban pajak perusahaan mungkin dipengaruhi oleh dorongan dan keinginan manajer untuk mencapai angka laba yang lebih tinggi.

Penelitian Otusanya (2011) memaparkan berbagai skema yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak, antara lain :

- 1) Penghindaran pajak penjualan dengan melaporkan pendapatan aktual lebih rendah dari yang seharusnya

- 2) Penghindaran pajak atas laba dengan cara melaporkan biaya produksi aktual lebih tinggi dari yang seharusnya
- 3) Penghindaran terhadap pemotongan pajak dengan cara melaporkan pembayaran upah lebih rendah dari yang sebenarnya.

2.1.2.1 Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rte*)

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Salah satu tarif pajak yang dapat dibebankan terhadap wajib pajak adalah tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*). Tarif pajak efektif adalah presentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus ditetapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Mills *et al.* (1998) dalam Reza (2012) meneliti *return* investasi dalam manajemen pajak dimana penelitiannya menggunakan ETR untuk mengukur efektivitas manajemen pajak. ETR sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur *tax planning* ataupun *tax avoidance*.

Dyrenge *et al.* (2008) menggunakan *GAAP ETR* dan *Cash ETR* untuk mengukur *tax avoidance*. Penggunaan *GAAP ETR* bertujuan untuk melihat pajak yang dilaporkan menurut akuntansi sedangkan penggunaan *Cash ETR* bertujuan untuk melihat jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Namun *GAAP ETR* dan *Cash ETR* sendiri memiliki kekurangan masing-masing. Perhitungan *GAAP ETR* mengikut sertakan pajak tangguhan sehingga tidak mencerminkan bentuk-bentuk

penghindaran pajak yang sebenarnya yang dibayar oleh perusahaan. Sedangkan kekurangan pada *Cash ETR* adalah dalam perhitungannya mengikutsertakan pajak diluar pajak penghasilan.

Penelitian ini menggunakan *GAAP ETR* karena angka *GAAP ETR* mewakili secara akuntansi dan menurut peraturan PSAK 46, bahwa pajak tangguhan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam penelitian ini, penggunaan ETR memang tidak dapat menggambarkan praktik *tax avoidance* secara persis, namun penggunaan ETR ini berfungsi untuk menunjukkan indikasi bahwa perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Indikasi praktik *tax avoidance* muncul ketika ETR yang dibayar perusahaan kecil, dan sebaliknya, jika ETR yang dibayar perusahaan itu tinggi, maka indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* rendah.

2.1.3 Auditor Eksternal

Auditor eksternal adalah akuntan publik bersertifikat yang meneliti catatan keuangan dan transaksi bisnis dari perusahaan dimana ia tidak berafiliasi dengan perusahaan tersebut. Auditor eksternal atau disebut juga auditor independen biasanya digunakan untuk menghindari konflik kepentingan dan untuk menjamin integritas proses audit.

Memastikan laporan keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa adanya tindak kecurangan di dalamnya merupakan tujuan dari audit eksternal. Sedangkan kegiatan audit eksternal sendiri merupakan persyaratan bagi

perusahaan yang *go public* untuk memberikan bukti akan kebenaran laporan keuangan kepada investor dan juga bisa dimaksudkan untuk melakukan tugas khusus seperti penyelidikan.

Tanggung jawab utama auditor eksternal adalah memberikan opini atas kewajaran pelaporan keuangan organisasi, terutama dalam penyajian posisi keuangan dalam suatu periode. Auditor eksternal juga menilai apakah laporan keuangan organisasi disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode. Opini ini akan digunakan para pengguna laporan keuangan, baik di dalam organisasi terlebih di luar organisasi karena laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan oleh para pemakai laporan yang berkepentingan terhadap perusahaan baik pihak eksternal (pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan lain sebagainya) maupun pihak internal (manajemen). Laporan keuangan juga bisa menjadi bukti pertanggungjawaban manajemen terhadap segala sumber daya pemilik yang telah dikelolanya. Auditor eksternal disini merupakan pihak ketiga, dengan kata lain auditor eksternal bukan bagian dari organisasi atau perusahaan yang terkait. Secara independen, para auditor eksternal melakukan penugasan berdasarkan kontrak yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan maupun standar profesional yang berlaku.

Mulyadi (2002) menjelaskan lima pendapat yang mungkin diberikan oleh auditor atas laporan keuangan yang diauditnya. Pendapat tersebut adalah:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

Kata “wajar” dalam paragraf pendapat mempunyai makna:

- a. Bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran.
 - b. Lengkap informasinya.
2. Laporan yang Berisi Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (*Unqualified Opinion Report with Explanatory Language*).

Jika laporan keuangan tetap disajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien namun terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, auditor dapat menambahkan suatu paragraf penjas atau bahasa penjas lain dalam laporan audit, meskipun tidak. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum.
Ketidakkonsistenan terjadi apabila ada perubahan prinsip akuntansi atau metode akuntansi yang mempunyai akibat material terhadap daya banding laporan keuangan perusahaan.
- b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup suatu entitas.
- c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

- d. Penekanan atas suatu hal.
 - e. Laporan audit yang melibatkan auditor lain.
3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit dapat diberikan jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini:

- a. Lingkup audit dibatasi oleh klien.
 - b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor.
 - c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
 - d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.
4. Pendapat tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar dapat diberikan oleh auditor jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Pendapat ini mengindikasikan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya dan tidak dapat digunakan oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*).

Laporan tanpa pendapat (*no opinion report*) dapat terjadi jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien dan terdapat pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit.

2.1.3.1 Ukuran KAP

Penelitian mengenai kualitas audit telah berfokus pada perbedaan antara auditor *Big 4* dan non *Big 4*. Alasan rasional yang mendasari hal ini adalah KAP yang lebih besar memiliki insentif yang lebih besar untuk mendeteksi dan mengungkapkan kesalahan pelaporan dalam manajemen. DeAngello dalam Effendi (2013) mengemukakan bahwa kualitas audit meningkat dengan ukuran KAP karena KAP besar mempunyai kemampuan lebih untuk berspesialisasi dan berinovasi melalui teknologi sehingga meningkatkan kemungkinan untuk menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi.

Namun terdapat fenomena menarik dalam penelitian mengenai ukuran KAP sebagai proksi dari auditor eksternal, yaitu dalam penelitian Li dan Lin (2005) dalam Alves (2013) menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor *Big 5* melaporkan lebih banyak *earning management*. Sejalan dengan hal itu, Anne *et al* dalam Alves (2013) menemukan bahwa klien kantor *Big 6* memiliki akrual abnormal yang lebih besar daripada klien dari KAP lain. Bersama dari penelitian-penelitian sebelumnya, KAP yang lebih besar dimungkinkan berkontribusi dalam mengurangi atau meningkatkan *earning management* dimana dalam konteks penelitian ini dikaitkan dengan *tax avoidance*. Maka dari itu

penelitian ini didasarkan pada *Big 4* dan *Non Big 4* pada ukuran KAP sebagai proksi dari auditor eksternal.

2.1.3.2 *Audit fee*

Profesi akuntan publik atau auditor eksternal berbeda dengan profesi lainnya seperti dokter atau pengacara. Seorang akuntan publik harus bersifat independen dimana dalam menjalankan tugasnya ia tidak boleh memihak kepada klien dalam melaporkan atau mendeteksi kecurangan. *Audit fee* merupakan fungsi dari jumlah kerja yang dilakukan oleh auditor, yang dapat ditentukan oleh jam kerja dan harga per jam. Menurut Al-Shammari *et al.* (2008) dalam Suhantinar (2014), besarnya *audit fee* yang ditetapkan oleh auditor dipengaruhi diantaranya oleh pengendalian intern klien; besar kecilnya klien (perusahaan *go public* dan privat); ukuran perusahaan; kompleksitas perusahaan; profitabilitas perusahaan; reputasi kantor akuntan publik; lokasi kantor akuntan publik; ukuran KAP (*Big 4 dan non Big 4*); risiko audit dan risiko perusahaan; jumlah anak perusahaan klien; jumlah cabang perusahaan; banyaknya transaksi dalam mata uang asing; besarnya total piutang; total persediaan; dan total aset.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No.KEP.024/IAPI/VII/2008, dalam menetapkan imbalan jasa atau *fee* audit, akuntan publik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebutuhan klien.
- b. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*).

- c. Independensi.
- d. Tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan.
- e. Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan.
- f. Basis penetapan *fee* yang disepakati.

Penelitian Kurniasih (2014) menemukan bahwa *audit fee* berhubungan positif dengan kualitas audit dimana biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit. Hal yang serupa juga ditegaskan oleh Abdul *et al.* (2006) dalam Hartadi (2009) yang menemukan bukti bahwa *audit fee* secara signifikan mempengaruhi kualitas audit. Berbagai macam penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil bahwa *audit fee* secara signifikan mempengaruhi kualitas audit.

Besarnya *audit fee* yang ditawarkan oleh suatu KAP kepada perusahaan dapat berbeda jumlah atau besarnya dengan *audit fee* KAP yang lain. Selama ini, penetapan *audit fee* dilakukan secara subjektif oleh salah satu pihak atau dengan dasar kekuatan tawar menawar antara akuntan publik dengan klien yang dipengaruhi juga oleh persaingan sesama akuntan publik. Penelitian Hoitash (2007) menemukan bukti bahwa ketika auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap

hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang jelas akan mengurangi kualitas laporan auditan. Tindakan ini jelas menjurus kepada tindakan pengesampingan *profesionalisme* yang akan mengurangi independensi auditor. Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), kualitas audit yang dipengaruhi oleh *audit fee* tersebut merupakan salah satu faktor yang sangat penting.

2.1.4 Komite Audit

Smith Report dalam Puspita (2014) menyatakan bahwa peran esensial dari komite audit adalah memastikan independensi dan objektivitas auditor eksternal, selain memonitor manajemen perusahaan. Peran utama dan tanggung jawab komite audit yaitu: mengawasi integritas laporan keuangan perusahaan; melakukan *review* atas sistem kontrol keuangan internal perusahaan; mengawasi dan melakukan *review* atas efektivitas fungsi audit internal perusahaan; membuat rekomendasi kepada dewan dalam hubungan dengan pertemuan dengan auditor eksternal dan menyetujui remunerasi dan perjanjian dengan auditor eksternal; mengawasi dan melakukan *review* atas independensi, efektivitas, dan objektivitas auditor eksternal; serta mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dalam perjanjian dengan auditor eksternal untuk memenuhi jasa non-audit.

Di dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal. Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal dan auditor eksternal akan mendukung proses audit internal dan eksternal menjadi lebih baik sehingga akan

meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Purwati (2006) mengungkapkan betapa serangkaian ketentuan mengenai Komite Audit telah dibuat, antara lain sebagai berikut :

- a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit.
- b. Keputusan Ketua BAPEPAM (yang sekarang telah berubah menjadi OJK) Nomor: KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit.
- d. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.
- e. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.

Menurut Effendi dalam Gradiyanto (2012), tujuan dan manfaat pembentukan komite audit adalah :

1. Pelaporan Keuangan

Direksi dan dewan komisaris bertanggungjawab atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggungjawab hanya atas laporan keuangan audit eksternal. Dalam hal ini komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaporan keuangan dan laporan audit eksternal.

2. Manajemen Risiko dan Kontrol

Komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.

3. *Corporate Governance*

Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan, sedangkan direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas pelaksanaan *corporate governance*,

Komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit,
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas.

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Tugas-tugas tersebut antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Hubungan yang erat antara komite audit dengan Dewan Komisaris terlihat dalam kewajiban pelaporan Komite Audit. Komite Audit bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan wajib membuat laporan atas setiap penggunaan yang diberikan. Untuk mengukur keefektifan komite audit, penelitian ini menggunakan dua proksi, yaitu jumlah frekuensi rapat komite audit dan *financial expertise background* anggota komite audit.

2.1.4.1 Jumlah Frekuensi Rapat

Wahid (2013) mengatakan bahwa Pertemuan Komite Audit berfungsi sebagai media formal untuk para anggota Komite Audit dalam rangka

pengawasan proses *corporate governance*. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-643/BL/2012 mengenai rapat Komite Audit :

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

2.1.4.2 *Financial expertise background*

Disyaratkan bagi anggota komite audit untuk independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan. Kompetensi bagi seorang komite audit merupakan kemampuan yang harus dimiliki mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan.

Sedangkan definisi kompetensi Komite Audit menurut Krismantono (2004) adalah sebagai berikut :

1. Integritas, kejujuran, objektif, dan independen.
2. Memahami seluk beluk bisnis dan keuangan perusahaan.

3. Mampu membaca laporan keuangan.
4. Memiliki kepekaan terhadap pengembangan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan.
5. Komitmen dan konsisten.

The Sarbanes Oxley Act menyinggung tentang adanya ahli akuntansi atau ahli keuangan dalam komite audit tetapi tidak memberikan kriteria yang pasti mengenai ”*financial expert*” itu sendiri (Purwati, 2006). UU ini hanya meminta SEC merumuskan kriteria ”*financial expert*” dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, *Chief Financial Officer, controller, Chief Accounting Officer*, atau posisi yang sejenis.
2. Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan.
3. Pengalaman dalam audit atas laporan keuangan perusahaan
4. Pengalaman dalam pengendalian internal
5. Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran (*estimates*), *accruals*, dan cadangan (*reserves*).

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil
1.	Kiridaran Kanagaretnam <i>et al.</i> (2014)	<i>Auditor Quality and Corporate Tax Avoidance</i>	Auditor quality dengan <i>Big 4/Non Big 4</i> Variabel Independen : Tax avoidance	Dampak kualitas audit terhadap penghindaran pajak semakin terungkap apabila institusi lemah
2.	Martinez dan Lessa (2014)	<i>The Effect of Tax Aggressiveness and Corporate to audit fee</i>	Variabel dependen : <i>Audit fee</i> Variabel Independen : Tax avoidance	Terdapat hubungan positif antara penghindaran pajak dan <i>audit fee</i>
3.	Puspita (2014)	Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak	Variabel dependen : Latar Belakang Keahlian Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Kompensasi Eksekutif, Struktur Kepemilikan Publik, Struktur Pemegang Saham Terbesar Variabel Independen : Penghindaran pajak	Kepemilikan saham publik dan kepemilikan saham terbesar berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4.	Reza (2012)	Pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap penghindaran pajak	Variabel Dependen : jumlah dewan komisaris, presentasi kehadiran dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, presentasi kehadiran komite audit, latar belakang keuangan komite audit	Jumlah anggota komite audit mempengaruhi <i>GAAP ETR</i> , dan latar belakang keuangan komite audit berpengaruh terhadap <i>current ETR</i>

			Variabel Independen : GAAP ETR dan Cash ETR	
5.	Jaya <i>et. al</i> (2013)	Corporate governance, Konservatisme akuntansi, dan penghindaran pajak	<i>Corporate governance</i> diukur melalui komposisi institusional kepemilikan, ukuran dewan dan kualitas audit. Konservatisme akuntansi diukur dengan akrual. Penghindaran pajak diukur dengan <i>tax shelter</i> .	Komposisi kepemilikan institusional, ukuran dewan audit kualitas; dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
6.	Alves (2013)	<i>The impact of audit committee existence and external auditor to earning management</i>	Variabel dependen : Keberadaan komite audit, Ukuran KAP Variabel Dependen : Manajemen laba (<i>discretionary accrual</i>)	Ukuran KAP berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen laba
7.	Irawan dan Aria (2012)	Pengaruh kompensasi dan <i>corporate governance</i> terhadap manajemen pajak perusahaan	Variabel Independen Kompensasi manajemen, kepemilikan saham direksi, <i>corporate governance</i> Variabel Dependen Manajemen pajak	Menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara <i>corporate governance</i> dengan <i>CETR</i>
8.	Armstrong, <i>et al.</i> (2013)	<i>Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance</i>	Dependen: penghindaran pajak Independen: tata kelola perusahaan (jumlah <i>financial</i>)	Tata kelola perusahaan cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak yang ekstrim

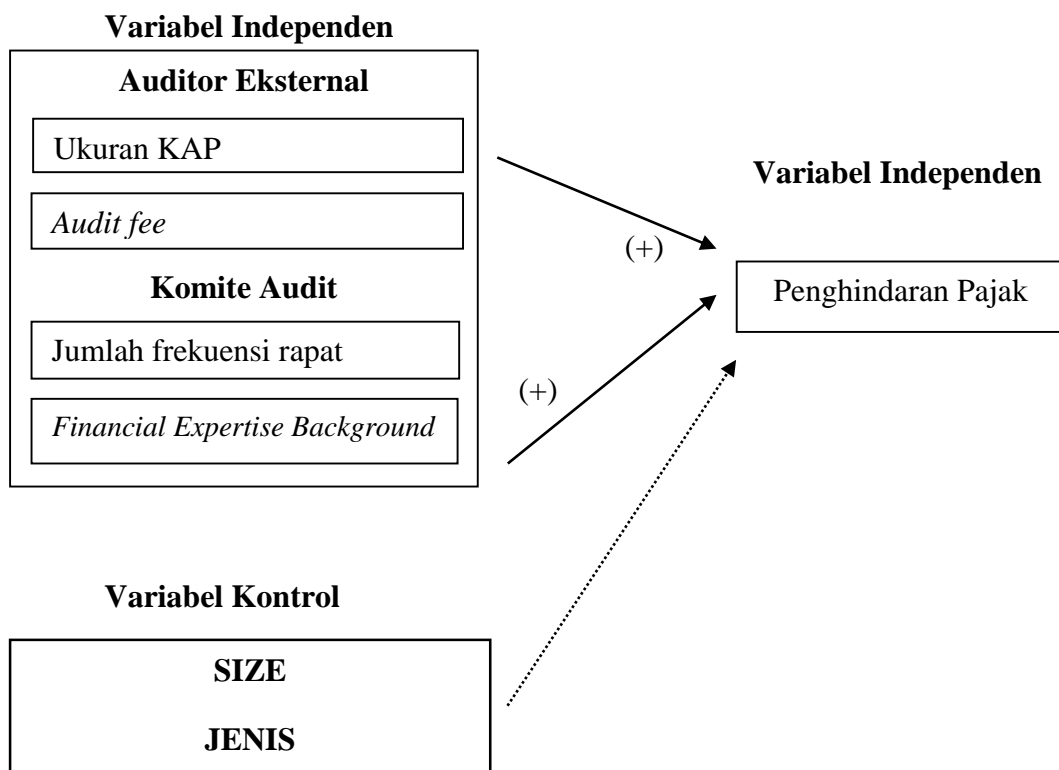
			<i>expertise</i> dewan direksi dan persentase direktur independen), insentif manajemen	tinggi
--	--	--	--	--------

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasar uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Kerangka pemikiran dijelaskan pada Gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh ukuran KAP terhadap *tax avoidance*

Sebagian besar perusahaan menggunakan jasa KAP *Big 4* sebagai auditor mereka untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Pemilihan KAP *Big 4* ini disebabkan oleh reputasi dan kredibilitas internasional yang dimiliki auditor. Oleh karena itu, penunjukkan auditor *Big 4* merupakan penanda bagi publik bahwa laporan keuangan yang dilaporkan memiliki kredibilitas yang tinggi. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa auditor dalam kelompok *Big 4* memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding non *Big 4*. Seperti pada penelitian oleh Becker *et al.* (1998) dalam Alves (2013) menemukan bahwa auditor *Big 4* menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi daripada auditor non *Big 4*, karena *Big 4* auditor memiliki insentif yang lebih besar untuk menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi daripada non *Big 4*. Namun dari hal diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa KAP *Big 4* dapat memfasilitasi manajer dalam upaya melakukan *tax avoidance* mengingat sebuah KAP juga menawarkan jasa *non assurance* yaitu berupa jasa pajak dan manajemen dimana peluang tersebut dapat digunakan manajemen untuk melakukan upaya *tax avoidance* guna mencapai kepentingannya. Hal ini diperkuat oleh penelitian Alves (2013) yang menyebutkan bahwa KAP *Big 4* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *earning management*.

Menurut *agency theory*, manajemen sebagai *agen* menunjuk auditor eksternal untuk memberikan opini dalam rangka mempertanggung jawabkan

kinerja perusahaannya kepada *principal*. Pihak *principal* dianggap akan lebih mempercayai laporan dari auditor dengan nama KAP yang besar. Namun karena adanya asimetri informasi yang terdapat dalam hubungan kepentingan manajemen dan pemilik saham, manajemen melakukan *moral hazard* dimana manajemen berupaya untuk melakukan *penghindaran pajak* agar laba tidak semakin kecil. Dalam hal ini manajemen mengikutsertakan peran auditor eksternal dari sebuah KAP yang dipercaya memiliki kompetensi untuk membantu mencapai tujuan manajemen itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.3.2 Pengaruh *audit fee* terhadap *tax avoidance*

Salah satu komponen profesionalisme yang benar-benar harus dipertahankan oleh akuntan publik professional adalah kualitas audit. Disini berarti akuntan publik harus bertindak secara independen, yaitu lebih mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan perusahaan (klien) dalam membuat laporan auditan. *Audit fee* bisa menjadi suatu hal yang dilematis karena auditor mendapat *fee* dari perusahaan (klien) yang diaudit. Auditor juga menerima imbalan dari perusahaan (klien) atas pekerjaan yang dilakukannya , tetapi di sisi lain auditor harus mempertahankan independensi ketika memberikan opini. Sehebat apapun tingkat kompetensi seorang auditor akan sangat tergantung dari variabel eksternal lainnya yang mendasari pengambilan keputusan auditor dalam pemberian opini (Hartadi, 2009).

Dalam penelitian Martinez dan Lessa (2014) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara *tax avoidance* dan *audit fee*. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki *tax avoidance* tinggi membayar *fee* auditor eksternal yang cukup tinggi pula. Abdul *et al.* (2006) dalam Hartadi (2009) menemukan bukti bahwa *fee* memang secara signifikan mempengaruhi kualitas audit, dengan menggunakan variabel *corporate governance characteristics*, *audit* dan *non-audit fees*, dan tipe opini audit di Malaysia. Selain itu Dhaliwal *et al.* dalam Hartadi (2009) meneliti hubungan *auditor fee* dengan kualitas audit. Dalam penelitian tersebut, mereka menemukan bukti bahwa *audit fee* secara signifikan mempengaruhi kualitas audit (independensi auditor). Disini, kualitas audit yang dipengaruhi oleh *fee* yang diterima auditor akan mencerminkan kinerja auditor eksternal dalam bekerja. Auditor menemui pilihan apakah dia harus mengutamakan independensi, atau mengutamakan kepentingan manajemen dalam hal *tax avoidance*

Menurut *agency theory*, dimana pihak manajemen (agen) sebagai pihak yang diberi tanggung jawab oleh *principal* akan terdorong untuk melakukan berbagai hal untuk memberikan hasil pertanggung jawaban yang terbaik di mata *principal*. Dalam prosesnya, hasil kerja manajemen terkadang tidak sesuai dengan realitanya, misalnya dengan melakukan usaha pencapaian laba tertentu lewat upaya penghindaran pajak. Disisi lain auditor dipekerjakan oleh *principal* yang menimbulkan *agency cost* yang berupa *audit fee*. *Agency cost* itu sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa agen dan manajer bertindak untuk kepentingan terbaik *principal*.

Dalam konteks *tax avoidance*, auditor eksternal diduga dituntut untuk mengerjakan tugas dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Alasan yang mendasarinya adalah auditor eksternal disini menghadapi situasi yang lebih rumit karena pekerjaannya tidak hanya sebatas memeriksa laporan keuangan dan memberikan opini, namun juga membantu manajemen dalam melihat celah-celah pajak yang bisa dimanfaatkan untuk *tax avoidance*. Dari gambaran ini, auditor eksternal yang menghadapi tingkat kompleksitas yang lebih tinggi diduga cenderung memiliki *fee* yang tinggi sesuai dengan tugas yang dihadapinya. Seperti yang ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No.KEP.024/IAPI/VII/2008, bahwa tingkat keahlian (*levels of expertise*) yang dibutuhkan dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan merupakan salah satu komponen dalam menetapkan imbalan jasa atau *fee* audit oleh seorang akuntan publik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : *Audit fee* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.3.3 Pengaruh jumlah frekuensi rapat komite audit terhadap *tax avoidance*

Dalam menerapkan *corporate governance*, keberadaan komite audit sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan efektivitas auditor internal dan eksternal. Menurut Dhaliwal (2003) dalam Reza (2012) frekuensi rapat ikut menentukan kuatnya *corporate governance* dalam komite audit. Beasley *et al.* (2004) dalam Pamudji dan Trihartati (2008) menyatakan bahwa frekuensi pertemuan komite audit lebih sedikit pada perusahaan yang

melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan, jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan.

Pada *agency theory* dijelaskan bahwa dapat terjadi keadaan dimana salah satu pihak memiliki lebih banyak informasi sehingga menimbulkan kondisi asimetri informasi. Hal ini terjadi dalam praktik *tax avoidance* yaitu agen memiliki lebih banyak informasi daripada *principal* yang salah satunya dapat disebabkan oleh hubungan antara agen dan *principal*. Semakin sering komite audit melakukan rapat, maka diduga terdapat kemungkinan untuk mendiskusikan upaya-upaya *tax avoidance* dalam rangka tujuan tertentu dari *agen*. Hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi antara pihak *principal* dan agen. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Jumlah frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.3.4 Pengaruh *financial expertise background* komite audit terhadap *tax avoidance*

Anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, maupun yang memiliki pengalaman atau *training* untuk mengerti masalah keuangan dapat meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Namun, dalam penelitian Reza (2012), ditemukan bahwa latar belakang keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *current ETR* sebagai proksi dari *tax avoidance*, dimana hal ini mengindikasikan semakin banyak jumlah anggota komite audit yang berlatar belakang keuangan, maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan. Temuan tersebut juga

menimbulkan dugaan bahwa anggota komite audit yang memiliki latar belakang keahlian dalam bidang akuntansi maupun keuangan dapat melihat celah-celah tertentu dalam hal pajak. Sedangkan De Zoort dan Saltrio (2001) dalam Reza (2012) menyatakan efektivitas komite audit tidak terlepas dari masalah kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh komite audit.

Menurut *agency theory*, dimana pihak agen sebagai pihak yang diberi tanggung jawab oleh *principal* akan terdorong untuk melakukan berbagai hal untuk memberikan hasil pertanggung jawaban yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau bidang keuangan pasti memiliki kompetensi untuk melihat celah dalam bidang keuangan. Hal ini sesuai tuntutan manajemen untuk pencapaian laba tertentu dengan melakukan *tax avoidance*. Sesuai dengan fungsi komite audit sebagai pihak yang berwenang dalam memberi saran, komite audit dapat memberikan saran-saran yang berkualitas dalam bidang perpajakan untuk membantu manajemen. Dengan banyaknya jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau bidang keuangan, maka hal tersebut dapat meningkatkan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

H4: *Financial expertise background* komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Bab III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran KAP, *audit fee*, jumlah rapat komite audit, dan *financial expertise background* komite audit terhadap *tax avoidance*.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Sedangkan pengertian dari variabel dependen itu sendiri adalah variabel utama yang diteliti yang juga dijelaskan variabilitasnya, serta diprediksi oleh peneliti dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi dari masalah. Variabel ini kemudian diteliti apakah mendapat pengaruh dari variabel independen.

Tax avoidance didefinisikan sebagai pengurangan utang pajak perusahaan. Penelitian ini memakai *GAAP ETR* untuk mengukur *tax avoidance* sesuai dengan Dyreng *et al.* (2008). *ETR (Effective Tax Rate)* merupakan ukuran estimasi kewajiban pajak dibanding laba sebelum pajak. Terdapat berbagai jenis *ETR* yang bisa digunakan sebagai proksi dalam mengukur *tax avoidance*. Sesuai dengan penelitian Hanlon dan Heitzman (2010),

GAAP ETR dipilih untuk mengukur *tax avoidance* karena *GAAP ETR* diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak. Alasan yang mendasari adalah perhitungan *GAAP ETR* melibatkan

pajak kini ditambah beban pajak tangguhan sehingga hal ini menunjukkan total keseluruhan beban pajak yang dibayar perusahaan. Sesuai PSAK 46, beban pajak tangguhan harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Jika dibandingkan dengan jenis ETR yang lain, tentunya *GAAP ETR* akan lebih menggambarkan keseluruhan beban pajak perusahaan, tidak hanya beban pajak kini. *GAAP ETR* dihitung dengan rumus yang digunakan Dyreng *et al.* (2008) :

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{tax expense}}{\text{pretax income}}$$

2.1.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik mempengaruhi secara positif maupun negatif. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari variabel-variabel berikut:

2.1.2.1 Auditor eksternal

Dalam penelitian ini, auditor eksternal diproksikan dengan 2 (dua) variabel, yaitu ukuran KAP dan besarnya *audit fee*.

1. Ukuran KAP (KAP)

Ukuran KAP dilihat dari besar kecilnya perusahaan audit dilihat dari tergabungnya di *The Big 4* atau *Non Big 4*. *Big 4* untuk KAP besar dan *Non Big 4* untuk KAP kecil. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa auditor yang termasuk *BIG 4* memiliki kualitas audit yang lebih tinggi karena fokus pada perlindungan reputasi dari nama mereka. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa KAP yang besar dapat menjamin independensinya dalam

praktiknya. Sebagian besar perusahaan menggunakan jasa KAP *Big 4* sebagai auditor mereka untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Pemilihan KAP *Big 4* ini disebabkan oleh reputasi dan kredibilitas internasional yang dimiliki auditor.

Kategori KAP *Big 4* di Indonesia yaitu :

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Drs.Haryanto Sahari & Rekan.
2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama dengan KAP Sidharta-Sidharta dan Widjaja.
3. KAP Ernets dan Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja.
4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP Osman Bing Satrio & Rekan.

Dalam penelitian ini, ukuran KAP menggunakan variabel *dummy*. Apabila perusahaan menggunakan jasa KAP *Big 4*, maka diberi kode 1. Sedangkan apabila perusahaan menggunakan jasa KAP non *Big 4* maka diberi kode 0.

2. **Audit Fee (FeeAudit)**

Audit fee merupakan fungsi dari jumlah kerja yang dilakukan oleh auditor, yang dapat ditentukan oleh jam kerja dan harga per jam. *Audit fee* dalam penelitian ini ditentukan dari besarnya *audit fee* yang diproporsikan dengan laba bersih perusahaan. Informasi ini dapat dilihat didalam laporan tahunan perusahaan

di bagian auditor eksternal/akuntan independen yang dicantumkan secara *voluntary* oleh perusahaan.

$$\text{Audit fee} = \frac{\text{audit fee}}{\text{laba bersih}}$$

2.1.2.2 Komite audit

Komite audit diproksikan dengan jumlah frekuensi rapat komite audit dan *financial expertise background* dari komite audit.

1. Jumlah frekuensi rapat komite audit (RapatKom)

Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat sedikitnya empat kali dalam setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan..

Frekuensi rapat komite audit = jumlah rapat yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

2. *Financial expertise background* (KeahlianKom)

Penelitian ini mengukur latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit sebagai proporsi anggota komite audit yang memiliki pengalaman sebagai akuntan, auditor, direktur keuangan atau *chief financial officer*, atau kepala akuntansi atau *chief accounting officer*, atau memiliki latar belakang pendidikan akuntansi (Puspita, 2014). Informasi ini dapat dilihat dari profil komite audit dalam laporan tahunan.

Cara menghitung proporsi *Financial expertise background* Komite Audit =

Anggota komite audit yang memiliki latar belakang keahlian keuangan *Jumlah seluruh anggota komite audit*

2.1.3 Variabel Kontrol

Penggunaan variabel kontrol dalam penelitian ini bertujuan untuk mengontrol hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel kontrol diduga ikut berpengaruh terhadap variabel independen. Dasar keputusan penggunaan variabel kontrol adalah untuk menghindari adanya unsur bias hasil penelitian. Dalam penelitian ini, variabel kontrol yang digunakan adalah

3.1.3.1 Size

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penelitian yang dilakukan oleh Lanis (2007) dalam Darmadi (2013) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Tetapi penelitian lain juga menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan berskala kecil, ini dikarenakan adanya *political cost* yang menyebabkan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan besar menjadi lebih tinggi (Zimmerman, dalam Darmadi 2013). Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini mengikuti Chen *et. al.* (2013) yang mengukur ukuran perusahaan dengan

$$\text{Size} = \text{LN}(\text{total aset})$$

3.1.3.2 Jenis perusahaan

Wallace *et al.* (1994) dalam Retno dan Priantinah (2012) mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan memiliki kecenderungan berbeda antara industri yang berbeda pula, hal ini menggambarkan keunikan karakteristik yang dimiliki masing-masing sektor perusahaan. Terdapat 9 (sembilan) sektor perusahaan yang terdapat dalam Bursa efek Indonesia, namun dalam penelitian ini jenis perusahaan diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu non keuangan dan keuangan untuk mempermudah pengukuran. Jenis perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy*. Jika perusahaan merupakan perusahaan non keuangan maka diberi kode 1. Sedangkan jika perusahaan merupakan perusahaan keuangan, maka diberi kode 0.

3.2 Populasi dan sampel penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Alasan pemilihan sampel dari perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia adalah karena saham-saham yang terpilih untuk dimasukkan dalam indeks Kompas 100 ini memiliki likuiditas yang tinggi, nilai kapitalisasi pasar yang besar, dan merupakan saham-saham yang memiliki fundamental dan kinerja yang baik. Sehingga pemilihan sampel dari perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100 diharapkan dapat mewakili penelitian mengenai *tax avoidance* dengan baik. Jenis sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan penelitian ini bersifat *cross sectional*. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan yang tercatat di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013
2. Laporan keuangan telah diaudit oleh auditor independen.
3. Perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian.
4. Perusahaan tersebut mencantumkan besar *audit fee* baik dalam mata uang Rupiah maupun Dollar. Jika disajikan dalam mata uang Dollar maka akan dikalikan kurs yang berlaku yang terdapat dalam laporan keuangan.
5. Data-data tersedia secara lengkap dalam laporan keuangan dan tahunan yang diterbitkan BEI.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada alasan : (1) Data mudah didapat, (2) lebih menghemat biaya, (3) penggunaan laporan keuangan yang didalamnya telah diaudit oleh auditor independen membuat data dipercaya keabsahannya. Data didapatkan dari :

1. Laporan tahunan 2010-2013 dan laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2010- 2013 yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia.
2. Jurnal, makalah, penelitian, buku, dan situs internet yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencatat data-data yang ada di laporan keuangan dan data-data yang tercatat di perusahaan yang listing di BEI. Data ini diperoleh dari pojok BEI Undip maupun *website* www.idx.co.id. Sedangkan studi kepustakaan adalah studi yang digunakan untuk memperoleh teori yang berhubungan dalam penelitian ini.

3.5 Metode Analisis data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2013).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian atas hipotesis. Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu

dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013). Selain itu uji statistik yang lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik *normal probability plot* adalah (Ghozali, 2013) :

1. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah (Ghozali, 2013):

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel

independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya (Ghozali, 2013)

Untuk menguji multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- a. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya > 0,90), maka hal ini merupakan adanya multikolinieritas.
- c. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya dan *variance inflation factor*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,1$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir (Ghozali, 2013)

3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji model apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lain tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya homoskedastisitas dan heteroskedastisitas. Cara untuk menganalisis ada atau tidaknya heteroskedastisitas :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013)

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi salah satunya dengan uji Durbin-Watson (DW test).

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan tabel Durbin-Watson (Ghozali, 2013):

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan ($4-du$), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah (di), maka koefisien autokorelasi lebih dari nol berarti ada autokorelasi positif.

3. Bila nilai DW lebih dari pada $(4-dl)$, maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara $(4-du)$ dan (dl) , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Cara lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji non prametrik *Runs Test*. Dasar pengambilan untuk uji *Runs test* adalah sebagai berikut :

H_0 : residual (res_1) random (acak)

H_1 : residual (Res_1) tidak random

Jika hasil Asymp. Sig. (2 tailed) tidak signifikan pada 0,05 maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random dan tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

3.5.3 Analisis regresi

Penelitian ini menggunakan model regresi *ordinary least square* (OLS) untuk menguji hipotesis, mengikuti Reza (2012). Model penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{GAAP_ETR} = \alpha + \beta_1 \text{KAP} + \beta_2 \text{FeeAudit} + \beta_3 \text{RapatKom} + \beta_4 \text{KeahlianKom} + \beta_5 \text{SIZE} + \beta_6 \text{JENIS} + \varepsilon$$

Dimana :

GAAP_ETR = ETR menurut beban pajak total

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien regresi

KAP	= Ukuran KAP Auditor Eksternal, <i>Big 4</i> atau Non <i>Big 4</i>
FeeAudit	= Besarnya <i>audit fee</i> auditor eksternal yang diproporsikan dengan laba bersih.
RapatKom	= Jumlah rapat komite audit dalam satu tahun
KeahlianKom	= <i>Financial Expertise Background</i> komite audit.
SIZE	= Ukuran perusahaan yang dihitung dengan LN(total aset)
JENIS	= Jenis perusahaan, keuangan dan non keuangan
ε	= error

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berada di antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2013). Dapat juga dikatakan bahwa $R^2=1$ menandakan suatu hubungan yang sempurna, sedangkan $R^2=0$ berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel auditor eksternal yaitu KAP, FeeAudit, dan variabel komite audit yaitu RapatKom, KeahlianKom serta variabel kontrol SIZE dan JENIS terhadap variabel *tax avoidance* (GAAP_ETR). Dalam menguji hipotesis di penelitian ini, digunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila probabilitas nilai F dalam uji signifikansi simultan (uji statistik F) lebih kecil dari 0,05 (signifikan), maka disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen, atau dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis tidak dapat ditolak. Ini berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

2. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansi $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.